

	News Title : Jurus Bappebti Perkuat Perdagangan Ekspor CPO hingga Bursa Kripto	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Arief Rahman Hakim
	Publish Date : 21 May 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Bursa CPO

HOME NEWS PEMILU **BISNIS** BOLA CRYPTO SHOWBIZ TEKNO FOTO HOT CEK FAK1

BISNIS Ekonomi Bank Saham Energi & Tambang Konsultasi Pajak CPNS Info Keme
Home > **Bisnis**

Jurus Bappebti Perkuat Perdagangan Ekspor CPO hingga Bursa Kripto

Arief Rahman Hakim
Diperbarui 21 Mei 2023, 21:25 WIB

Copy Link Share 13



Bappebti. Foto: www.bappebti.go.id

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah memperkuat perdagangan berbasis komoditi di Indonesia. Mulai dari ekspor crude palm oil (CPO) hingga pembentukan bursa **kripto** yang jadi hal paling anyar.

Kepala **Bappebti** Didid Noordiatmoko mengungkap akan terus mendiseminasikan berbagai kebijakan dan perkembangan kepada para pemangku kepentingan agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat segera dimanfaatkan.



"Bappebti perlu mengedukasi dan memberikan pemahaman yang benar terkait berbagai isu terkini di bidang PBK, baik kepada pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum. Hal ini untuk menciptakan ekosistem yang nyaman dan terpercaya di bidang PBK," tegas Didid dalam keterangannya, Minggu (21/5/2023).

Beberapa hal yang jadi perhatiannya, diantaranya kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka di Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindak lanjut UU No. 4/2023, Expert Advisor (EA) untuk penanggulangan kasus robot trading. Kemudian, penguatan Sistem Resi Gudang (SRG), dan tindak lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI menyoal pembentukan Bursa Kripto.

Pertama, Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia. Didid menjelaskan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka merupakan terobosan atau inovasi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO dan pendapatan negara melalui pajak ekspor. Hal ini juga sejalan dengan mandat UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011.

"Kebijakan yang diatur adalah ekspor untuk CPO HS 15111000. Nantinya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang ditunjuk oleh Bappebti. Selain Permendag tentang ekspor, kami juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka," terang Didid.

Melalui langkah ini, diharapkan akan terbentuk harga acuan CPO di bursa. Harga yang terbentuk akan transparan, akuntabel, dan real time. Sehingga, dapat dipergunakan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan.

Di sisi hulu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga tandan buah segar bagi petani. Kementerian Perdagangan menargetkan pada Juni 2023 sudah dilakukan peluncuran kebijakan tersebut.

Kedua, RPP Tindak Lanjut UU No. 4/2023. Diketahui, pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dan derivatifnya akan dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RPP ini akan mengatur mekanisme pengalihan tersebut. Prinsipnya, mekanisme pengalihan harus seminimal mungkin memberikan guncangan pada industri.

"Bahkan, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri dan stabilisasi sektor keuangan. Bappebti akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk menjaga masa transisi peralihan tersebut berjalan dengan baik," terang Didid.